

Pendampingan Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Berbasis SIPD RI pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Feryansyah^{1*}, Alfian Sayuti², Herawati Khotmi¹, Dina Amalya Putri¹, Reny Wardiningsih¹, Khaerul Umam¹, Resty Yusnirmala Dewi¹

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

²Universitas Bumi Gora, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: feriiansiih@staff.unram.ac.id

Dikirim: 11-05-2025; Direvisi: 25-05-2025; Diterima: 26-05-2025

Abstrak: Catatan atas Laporan Keuangan merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan secara detail dan menambah informasi atas laporan keuangan utama. Catatan atas Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan penuh kehati-hatian agar sesuai dengan prinsip-prinsip pada Standar Akuntansi Pemerintah dan Basis SIPD RI menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Aparatur pada Sub Bagian Keuangan dan Aset Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai penyusun laporan keuangan mengalami kendala dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini disebabkan karena adanya pergantian aparatur tanpa menggenerasikan ilmu yang dimiliki dan kurangnya pengalaman serta latar pendidikan yang tidak mendukung sehingga pemahaman terhadap penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan tidak memadai. Dalam mengatasi masalah tersebut, metode yang digunakan terdiri dari tahap persiapan yaitu mengidentifikasi SIPD RI pada Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta mengidentifikasi penguasaan dokumen pendukung penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan. Dan tahap pelaksanaan yaitu menyusun Catatan atas Laporan Keuangan Basis SIPD RI dengan data-data yang valid. Tujuan pemberian pelatihan secara aplikatif dan pendampingan secara langsung adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap aparatur tersebut cara menyusun Catatan atas Laporan Keuangan yang baik dan benar, sehingga aparatur tersebut berhasil berdasarkan pemahaman, keterampilan, dan kemandiriannya dalam menyelesaikan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: CaLK; pengelolaan keuangan; SIPD RI

Abstract: The Notes to the Financial Statements are an integral part of the financial statements that provide detailed explanations and additional information to support the main financial reports. Properly and carefully prepared Notes to the Financial Statements, in accordance with the principles of Government Accounting Standards and the SIPD RI basis, serve as evidence that regional financial management is accountable. The personnel in the Finance and Asset Subdivision of the Provincial Health Office of West Nusa Tenggara, who are responsible for preparing the financial statements, face challenges in compiling the Notes to the Financial Statements. These issues arise due to staff turnover without the transfer of knowledge, limited experience, and educational backgrounds that do not support financial reporting, resulting in inadequate understanding of how to prepare the Notes to the Financial Statements. To address these challenges, the method used includes a preparation stage, which involves identifying the SIPD RI system in Accounting and Financial Reporting, as well as identifying the mastery of supporting documents required for compiling the Notes to the Financial Statements. The implementation stage involves preparing the Notes to the Financial Statements based on the SIPD RI system using valid data. The purpose of providing practical training and direct assistance is to equip personnel with the knowledge to

correctly and properly compile the Notes to the Financial Statements. This will enable them to successfully complete the preparation of the Notes based on their understanding, skills, and independence—ensuring the Notes are submitted on time and are accountable.

Keywords: CaLK; financial management; SIPD RI

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memenuhi prinsip-prinsip *good governance* menjadi tuntutan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah yang menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun (2005) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun (2006) dan perubahannya, yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun (2011) (Aulia et al., 2024). Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan, profesional, dan akuntabel guna meningkatkan performa keuangan daerah (Dewi et al., 2023).

Akuntansi adalah salah satu sumber permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan daerah (Syahrída, 2019). Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkendala dalam mengelola keuangan daerah dikarenakan minimnya pemahaman tentang akuntansi, sehingga untuk mencapai akuntabilitas keuangan daerah, masing-masing OPD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus lebih cermat dan teliti. Sistem akuntabilitas keuangan suatu organisasi daerah dapat dikatakan baik apabila organisasi tersebut telah menerapkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang baik (Mardiasmo, 2004).

Pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara optimal dengan diimplementasikannya suatu sistem akuntansi yang andal didukung dengan kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Sistem akuntansi tersebut harus mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Vidyasari & Suryono, 2021). Karena laporan keuangan menjadi media utama dalam menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (Meynaldi & Rosalina, 2023).

Salah satu bentuk akuntabilitas keuangan ini tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan daerah memberikan informasi tentang keadaan keuangan pemerintah daerah dan menjadi salah satu barometer dalam mengukur performa pemerintahan daerah (Fahmi, 2012). Ikatan Akuntan Indonesia (2009) menjelaskan dalam PSAK No. 1 Revisi 2009 bahwa laporan keuangan sebagai media yang menyajikan informasi keuangan secara terstruktur dari posisi keuangan hingga kinerja keuangan suatu organisasi. Jadi laporan keuangan adalah salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai *sustainable* organisasi (Salain & Wedana, 2023).

Laporan keuangan pemerintah daerah terbagi atas beberapa unsur utama, termasuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK berfungsi sebagai pelengkap laporan keuangan, memberikan penjabaran secara rinci, serta menambah



informasi penting yang tidak tersaji secara langsung dalam laporan keuangan utama (Kapantow et al., 2023).

Seiring perkembangan regulasi dan kebijakan nasional, serta dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah telah menerapkan sistem informasi yang terintegrasi, salah satunya adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) (Gitarisdiana et al., 2024). SIPD RI merupakan sistem informasi yang dirancang lebih adaptif, responsive, dinamis, inovatif dan akuntabel sesuai amanat Pasal 391 Undang-Undang Nomor 23 Tahun (2014) dan dipertegas melalui Permendagri Nomor 70 Tahun (2019), dimana SIPD RI memuat seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan (Salain & Wedana, 2023). Implementasi SIPD RI berguna dalam mewujudkan keterpaduan data dan informasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public (Arif & Firmansyah, 2024). Namun demikian, perubahan sistem ini menuntut kesiapan aparatur pada organisasi, terutama dalam hal penyusunan laporan keuangan, salah satunya pada CaLK yang berbasis pada SIPD RI tersebut.

Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dinkes NTB) sebagai salah satu OPD yang memiliki peran strategis dengan alokasi anggaran yang signifikan, perlu memastikan bahwa penyusunan CaLK tidak hanya memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tetapi juga selaras dengan kebijakan berbasis SIPD RI. Sub bagian keuangan dan aset pada Dinkes NTB memegang peranan yang penting dalam mengelola keuangan OPD, salah satu hasilnya adalah tersusunnya laporan keuangan berupa CaLK.

Laporan keuangan CaLK Dinkes NTB masih disusun dalam keadaan belum sepenuhnya berdasarkan aplikasi SIPD RI. Artinya sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan CaLK masih menggunakan data-data hasil rekapan untuk diterapkan pada isi dari laporan keuangan CaLK tanpa dikombinasikan dengan data-data dari SIPD RI. Hal ini dikarenakan penggunaan aplikasi SIPD RI oleh sumber daya manusia tersebut masih terbilang baru, sehingga perlu adaptasi yang cukup lama dalam memahami aplikasi tersebut.

Aparatur pada sub bagian keuangan dan aset Dinkes NTB terdiri dari beberapa sumber daya manusia yang telah memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola keuangan OPD. Namun, aparatur yang bertanggung jawab pada jabatan penyusun laporan keuangan khususnya CaLK sekaligus sebagai operator SIPD RI sering mengalami pergantian aparatur tanpa mentransmisikan ilmu yang dimiliki. Aparatur baru yang mengisi jabatan tersebut belum memiliki pengalaman dan latar pendidikannya bukan dari bidang akuntansi untuk mendukung dalam pekerjaan penyusunan CaLK, serta aparatur tersebut belum menguasai aplikasi SIPD RI. Sehingga, sub bagian keuangan dan aset Dinkes NTB memiliki masalah yang harus dihadapi yaitu seorang aparatur baru selaku penyusun CaLK pada OPD tersebut memiliki keterbatasan pada pemahaman teknis terhadap sistem baru terutama dalam hal mengidentifikasi menu-menu yang ada di SIPD RI dan keterbatasan dalam penguasaan dokumen pendukung penyusunan CaLK. Akibatnya, proses penyusunan CaLK menjadi kurang akuntabel dan terlambat dalam penyelesaiannya.

Oleh karena itu, aparatur baru pada sub bagian keuangan dan aset tersebut perlu diberikan pengetahuan secara aplikatif sehingga aparatur tersebut dapat

memahami secara langsung penggunaan aplikasi SIPD RI dan penyusunan CaLK. Tujuan pendampingan teknis yang diberikan dalam penyusunan CaLK berbasis SIPD RI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kemandirian kepada aparatur tersebut sehingga tersusun CaLK yang akurat, lengkap, sesuai ketentuan, dan tepat waktu.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan ini melibatkan aparatur bagian keuangan dan aset yang memiliki tanggung jawab sebagai pembuat laporan keuangan OPD Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keterlibatan dilakukan dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan diskusi sehingga didapat sebuah kesimpulan terkait kebutuhan yang diperlukan oleh aparatur tersebut dalam memahami penyusunan CaLK berbasis SIPD RI. Metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan pada kegiatan ini meliputi dua kegiatan yaitu:

a. Identifikasi SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Aparatur mengenal menu yang menyediakan historis nilai saldo keuangan dari masing-masing akun atau rekening laporan keuangan dan menu yang menyajikan luaran atau output berupa laporan keuangan seperti neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas yang dapat digunakan sebagai bahan penyusunan CaLK.

b. Identifikasi Dokumen Pendukung

Aparatur mengumpulkan dan mempelajari dokumen dimaksud untuk satu tahun anggaran. Dokumen ini memberikan informasi yang valid dan lengkap karena telah disinkronisasikan dengan pihak yang berwenang. Dokumen pendukung sangat berpengaruh dalam proses penyusunan CaLK.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pada kegiatan ini adalah proses penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimana aparatur dapat menyusun CaLK berdasarkan data-data yang didapat dari SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta dokumen pendukung untuk satu tahun anggaran yang sudah disesuaikan dan disetujui oleh pihak berwenang tersebut.

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu bentuk implementasi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman agar dapat memberikan manfaat bagi orang lain adalah melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam mentransfer kompetensi serta memberikan kontribusi nyata kepada pihak yang membutuhkan pendampingan, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan.

Berbekal literasi dan pengalaman dalam penyusunan CaLK pada salah satu OPD di lingkungan Pemerintahan Daerah, pengetahuan tersebut kemudian

diterapkan dalam kegiatan pelatihan dan pembimbingan kepada aparatur yang mengalami kendala dalam menyusun CaLK.

Aparatur dimaksud menghadapi tantangan karena baru pertama kali menerima tugas penyusunan CaLK, seiring dengan terjadinya pergantian personel di instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang bersifat langsung dan aplikatif agar pemahaman terhadap proses penyusunan CaLK dapat diperoleh secara menyeluruh, baik dari aspek teknis maupun substantif.

Berikut kegiatan yang dilakukan bersama aparatur tersebut dalam menyelesaikan penyusunan CaLK Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat:



Gambar 1. Pendampingan SIPD RI, analisa dokumen pendukung, dan penyusunan CaLK

Sebelum aparatur memulai proses penyusunan CaLK sesuai dengan data yang valid, pada tahap persiapan penulis memberikan pengenalan yang mendalam pada aplikasi SIPD RI yang khusus digunakan untuk pelaporan keuangan. Pada aplikasi tersebut, aparatur bersangkutan dapat mencari data-data keuangan. Pada tahap persiapan ini, penulis mengarahkan aparatur untuk mengakses situs SIPD RI (<https://sipd.kemendagri.go.id/landing>) dan login menggunakan akun kepala OPD dengan tahun anggaran 2024. Setelah berhasil masuk ke dashboard SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penulis mengarahkan aparatur untuk mengakses menu buku besar untuk mencari riwayat data-data keuangan dimaksud berupa riwayat belanja, pendapatan, beban, dan lainnya selama satu tahun anggaran. Selain itu, aparatur dapat memanfaatkan salah satu menu yang lain untuk mengunduh kebutuhan laporan keuangan sesuai basis SIPD RI. Penulis mengarahkan aparatur tersebut untuk mengakses menu laporan keuangan dan mengunduh laporan keuangan yang dibutuhkan untuk penyusunan CaLK.

Tahap persiapan berikutnya adalah penulis mengarahkan aparatur untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen pendukung yang telah disetujui oleh pihak yang bertanggungjawab seperti dokumen rekonsiliasi persediaan dan rekonsiliasi barang milik daerah (BMD). Dokumen ini dapat memberikan informasi yang lebih detail selama satu tahun anggaran terkait realisasi belanja fisik dan keuangan. Penulis menjelaskan makna ikhtisar data-data yang tertuang pada dokumen berita acara dan menjelaskan sumber data-data tersebut dari dokumen pendukungnya seperti lampiran keuangan dan non keuangan. Dari lampiran tersebut, aparatur dapat memahami alokasi data-data baik yang masuk dan keluar sehingga didapat saldo akhir dari ikhtisar data pada dokumen berita acara.

Setelah data yang dibutuhkan lengkap, tahap pelaksanaannya adalah penulis mendampingi cara menyusun CaLK kepada aparatur tersebut. Penulis mengarahkan aparatur untuk mengisi bagian kolom-kolom yang mudah untuk dikerjakan terlebih dahulu pada beberapa bagian unsur laporan keuangan seperti komponen akun neraca,

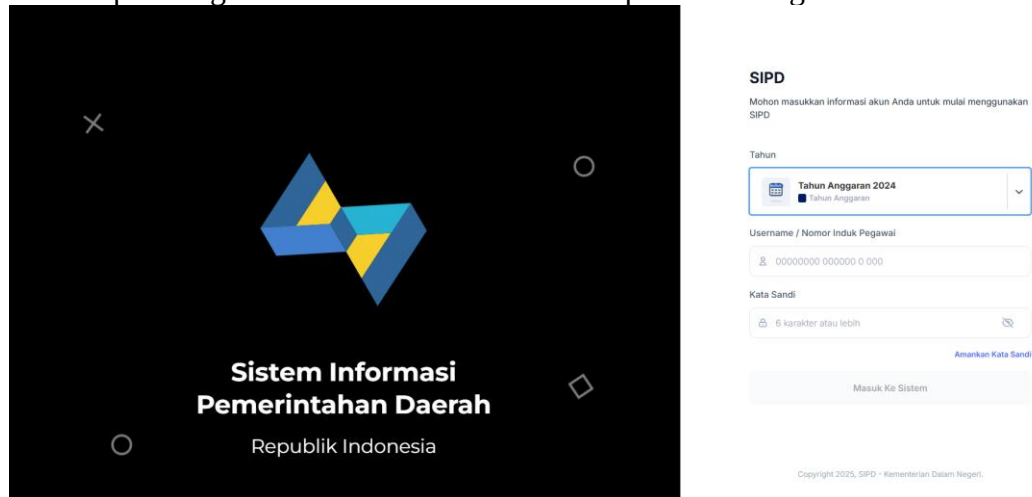
komponen akun laporan realisasi anggaran, komponen akun laporan operasional, dan komponen akun laporan perubahan ekuitas.

Pembahasan

Aplikasi SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pada tahap ini, penulis menampilkan dan mengenalkan beberapa menu SIPD RI yang dibutuhkan oleh aparaturnya tersebut. Berikut beberapa tampilan dari SIPD RI:

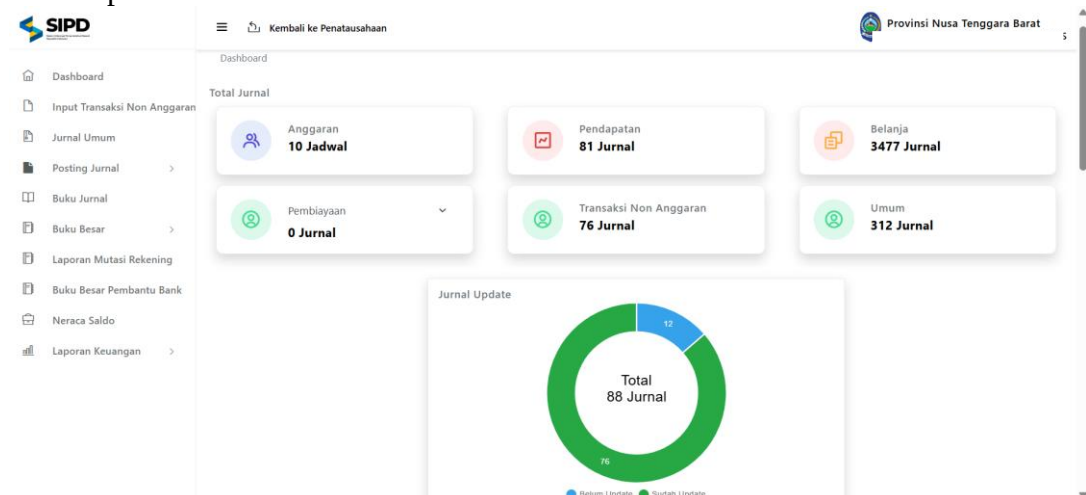
1. Tampilan login SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Gambar 2. Tampilan login SIPD RI Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tampilan awal dari SIPD RI ini adalah halaman login. Pada bagian ini, pengguna dapat mengakses menu-menu yang disediakan SIPD RI setelah pengguna berhasil login menggunakan Nomor Induk Pegawai yang berwenang yakni Kepala OPD dan kata sandi yang telah ditentukan. Sebelum itu, pengguna terlebih dahulu memilih tahun anggaran yang data-datanya dibutuhkan pada kegiatan ini. Misalkan tahun anggaran 2024.

2. Tampilan Dashboard



Gambar 3. Tampilan Halaman Dashboard

Halaman dashboard menampilkan informasi tentang pembaruan (update) jurnal yang berhasil dientri oleh pihak akuntansi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD). Disamping itu, terdapat beberapa menu yang dapat digunakan untuk mencari informasi berupa data-data keuangan OPD, namun untuk kebutuhan penyusunan CaLK, penulis hanya menyarankan penggunaan menu buku besar dan laporan keuangan, karena data-data dimaksud sebagian besar didapat pada kedua menu tersebut.

3. Tampilan Buku Besar

Gambar 4. Tampilan Halaman Buku Besar

Halaman buku besar menampilkan setiap transaksi yang telah dientri di SIPD RI. Lembar buku besar terdiri dari kolom tanggal transaksi, uraian terkait kode belanja, referensi terkait nomor jurnal transaksi, nomor bukti terkait nomor surat pertanggungjawaban (SPJ), debit dan kredit terkait nominal saldo normal rekening, dan saldo menunjukkan nilai kumulatif selama satu tahun anggaran sehingga didapat nominal akhir (31 Desember 2024). Sebelum itu, pengguna mengisi terlebih dahulu bagian kolom seperti SKPD, konsolidasi SKPD, klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur rekening, rekening, dan tanggal. Setelah itu, pengguna dapat memilih tools terapkan untuk menampilkan lembar buku besar.

4. Tampilan Laporan Keuangan

Gambar 5. Tampilan Halaman Laporan Keuangan

Halaman laporan keuangan menampilkan informasi berupa ikhtisar data keuangan dari masing-masing akun atau rekening. Submenu laporan keuangan terdiri dari 4 jenis laporan keuangan yaitu : neraca (menampilkan asset, liabilitas, dan ekuitas), LRA – laporan realisasi anggaran (menampilkan pendapatan dan belanja), LO – laporan operasional (menampilkan pendapatan LO dan beban), dan LPE – laporan perubahan ekuitas (menampilkan ekuitas) (Sijabat et al., 2024). Sebelum itu, pengguna harus mengisi kolom SKPD, klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur rekening, tanggal, konsolidasi SKPD, dan preview laporan. Kemudian memilih tools terapan untuk menampilkan jenis laporan keuangan yang telah dipilih sebelumnya.

Dokumen Pendukung

Pada tahap ini, penulis mendampingi aparaturnya untuk mempelajari dokumen pendukung yang telah dikumpulkan. Berikut adalah tampilan dokumen tersebut dalam bentuk softfile:

The image shows two screenshots of Microsoft Excel spreadsheets. The left spreadsheet is titled 'PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS KESEHATAN' and contains a table for 'Nilai BMD Semester I Tahun 2024'. The right spreadsheet is also titled 'PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS KESEHATAN' and contains a table for 'Uraian' with columns for 'Saldo Awal', 'Mutasi', 'Saldo Akhir', and 'Saldo Akhir (Rp)'.

No	Alasan Neraca	Saldo Awal (Rp)	Mutasi	Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1.	Ases Luncas			
2.	Ases Luncas			
3.	Ases Luncas			
4.	Ases Luncas			
5.	Ases Luncas			
6.	Ases Luncas			
7.	Ases Luncas			
8.	Ases Luncas			
9.	Ases Luncas			
10.	Ases Luncas			
11.	Ases Luncas			
12.	Ases Luncas			
13.	Ases Luncas			
14.	Ases Luncas			
15.	Ases Luncas			
16.	Ases Luncas			
17.	Ases Luncas			
18.	Ases Luncas			
19.	Ases Luncas			
20.	Ases Luncas			
21.	Ases Luncas			
22.	Ases Luncas			
23.	Ases Luncas			
24.	Ases Luncas			
25.	Ases Luncas			
26.	Ases Luncas			
27.	Ases Luncas			
28.	Ases Luncas			
29.	Ases Luncas			
30.	Ases Luncas			
31.	Ases Luncas			
32.	Ases Luncas			
33.	Ases Luncas			
34.	Ases Luncas			
35.	Ases Luncas			
36.	Ases Luncas			
37.	Ases Luncas			
38.	Ases Luncas			
39.	Ases Luncas			
40.	Ases Luncas			
41.	Ases Luncas			
42.	Ases Luncas			
43.	Ases Luncas			
44.	Ases Luncas			
45.	Ases Luncas			
46.	Ases Luncas			
47.	Ases Luncas			
48.	Ases Luncas			
49.	Ases Luncas			
50.	Ases Luncas			
51.	Ases Luncas			
52.	Ases Luncas			
53.	Ases Luncas			
54.	Ases Luncas			
55.	Ases Luncas			
56.	Ases Luncas			
57.	Ases Luncas			
58.	Ases Luncas			
59.	Ases Luncas			
60.	Ases Luncas			
61.	Ases Luncas			
62.	Ases Luncas			
63.	Ases Luncas			
64.	Ases Luncas			
65.	Ases Luncas			
66.	Ases Luncas			
67.	Ases Luncas			
68.	Ases Luncas			
69.	Ases Luncas			
70.	Ases Luncas			
71.	Ases Luncas			
72.	Ases Luncas			
73.	Ases Luncas			
74.	Ases Luncas			
75.	Ases Luncas			
76.	Ases Luncas			
77.	Ases Luncas			
78.	Ases Luncas			
79.	Ases Luncas			
80.	Ases Luncas			
81.	Ases Luncas			
82.	Ases Luncas			
83.	Ases Luncas			
84.	Ases Luncas			
85.	Ases Luncas			
86.	Ases Luncas			
87.	Ases Luncas			
88.	Ases Luncas			
89.	Ases Luncas			
90.	Ases Luncas			
91.	Ases Luncas			
92.	Ases Luncas			
93.	Ases Luncas			
94.	Ases Luncas			
95.	Ases Luncas			
96.	Ases Luncas			
97.	Ases Luncas			
98.	Ases Luncas			
99.	Ases Luncas			
100.	Ases Luncas			

Gambar 6. Dokumen Softfile Rekonsiliasi BMD dan Persediaan

Dokumen rekonsiliasi persediaan adalah dokumen sah yang merincikan stock persediaan sebelumnya dan selama satu tahun anggaran. Dokumen ini terdiri dari, pertama: berita acara yang menyajikan informasi data-data per nama barang berdasarkan standar yang telah digunakan, kedua: berita acara stock opname yang menyajikan informasi lebih detail data-data saldo persediaan akhir per nama barang, dan ketiga: rincian persediaan per bidang menyajikan informasi lebih detail sesuai lokasi persediaan tersebut digunakan.

Dokumen rekonsiliasi BMD adalah dokumen sah yang merincikan data-data asset sebelum dan selama satu tahun anggaran. Beberapa data yang penting dibutuhkan pada dokumen ini terdapat di bagian, pertama: berita acara yang menyajikan ikhtisar data asset seperti persediaan, tanah, bangunan, peralatan, jalan jaringan dan irigasi, kedua: kertas kerja keuangan yang menyajikan belanja modal dan belanja barang dan jasa pembentuk asset selama setahun, ketiga: kertas kerja nonkeuangan yang menyajikan data asset yang sifatnya memengaruhi nilai asset dari aspek mutasi masuk dan keluar, serta data penyusutan asset.

Kedua dokumen ini sangat dibutuhkan saat proses penyusunan CaLK, karena informasi yang disajikan detail dan mudah untuk dipahami oleh aparaturnya tersebut.

Penyusunan CaLK

Tahap ini bagian inti dari kegiatan pengabdian masyarakat, dimana aparaturnya tersebut menyusun CaLK sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan khususnya bagian CaLK yang valid dan akuntabel. CaLK merupakan penjelasan secara naratif dari nominal yang tertera pada LRA, LO, LPE, dan Neraca (Prasetyo & Utami, 2022). Berikut adalah sebagian tampilan CaLK basis SIPD RI yang disusun manual:

The screenshot displays a manual CaLK report for 2024 and 2023. The report is organized into several sections, including 'Perencanaan' (Planning) and 'Tetap' (Fixed). The 'Perencanaan' section includes a table for 'Uraian' (Description) with columns for 2024 (Rp) and 2023 (Rp). The 'Tetap' section includes a table for 'Uraian' (Description) with columns for 2024 (Rp) and 2023 (Rp). The report also includes a 'Saldo' (Balance) section for 2024 and 2023, and a 'Saldo Awal' (Initial Balance) section for 2024 and 2023. The report is generated using a software application, as indicated by the 'File', 'Home', 'Insert', 'Draw', 'Design', 'Layout', 'References', 'Mailings', 'Review', 'View', 'Help', and 'Acrobat' menu items at the top.

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Saldo Awal	82.500.000,00	137.441.300,00
b. Saldo Cadang	0,00	0,00
c. Saldo Aset Tetap Lainnya	218.847.000,00	162.190.000,00
d. Saldo Aset Tetap	12.226.731.965,15	16.188.117.429,41
e. Perencanaan untuk Dijual/Diambil	297.817.760,00	1.988.513.000,00
f. Perencanaan	0,00	0,00
g. Penambahan Daya Tahunan	0,00	0,00
h. Saldo Awal Tahunan	0,00	0,00
i. Saldo Awal	0,00	0,00
j. Saldo 19	0,00	2.083.741.689,00
Jumlah	12.848.917.420,15	21.202.446.329,41

Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
a. Gedung dan Bangunan	34.248.493.677,38	27.141.826.057,38
b. Jalan, Jalan dan Jaringan	5.875.231.780,00	4.542.434.080,00
c. Aset Tetap Lainnya	24.965.777,00	24.965.777,00
d. Aset Tetap Lainnya	59.000.000,00	49.000.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	(45.499.743.478,57)	(41.211.053.609,85)
Jumlah	49.214.299.320,81	42.164.520.420,54

Gambar 7. Format laporan keuangan bagian CaLK

Berdasarkan format CaLK basis SIPD RI, aparaturnya mulai menyusun CaLK sesuai kebutuhan, maksudnya aparaturnya dapat memilih bagian-bagian yang mudah untuk dikerjakan. Pada format ini, bagian yang sangat penting dalam penyajiannya adalah penjelasan dari masing-masing unsur laporan keuangan. Unsur ini terdiri dari:

1. Komponen Akun Neraca

Neraca menerangkan posisi keuangan meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas per akhir tahun 2024 dan 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa aset menunjukkan kekayaan yang dimiliki sebagai akibat transaksi kejadian masa lalu dan keberadaannya diharapkan bermanfaat bagi kepentingan umum serta dapat diterima oleh pemerintah. Liabilitas menunjukkan utang yang muncul disebabkan kejadian masa lalu dan untuk penyelesaiannya diperlukan pengorbanan oleh pemerintah. Sedangkan, ekuitas menunjukkan kekayaan bersih setelah kekayaan berupa aset dikurangi liabilitas pada tanggal laporan.

Pada bagian ini, aparaturnya harus menjelaskan sumber dari nilai saldo akhir dari masing-masing komponen akun neraca. Misalkan saldo peralatan dan mesin milik Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp 2.500.000.000 dan Rp 2.000.000.000, terdapat selisih Rp 500.000.000, maka aparaturnya harus memberikan penjelasan secara detail rincian dari Rp 500.000.000 tersebut.

2. Komponen Akun Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan laporan realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran dari setiap kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran

mengenai pendapatan dan belanja. Pendapatan adalah penerimaan dari pelayanan yang dianggarkan untuk dicapai target realisasinya. Sedangkan belanja adalah pengeluaran dana atas kegiatan yang dianggarkan untuk diserap realisasinya.

Pada bagian ini, aparatur hanya merincikan nilai anggaran dan realisasi dari masing-masing akun pendapatan dan belanja. Lalu aparatur membuat persentase nilai realisasi terhadap nilai anggarannya dan membandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Misalkan anggaran dan realisasi akun belanja pegawai sebesar Rp 850.000.000 dan Rp 845.000.000 maka persentasenya adalah 99,41%. Nilai realisasi tahun sebelumnya adalah Rp 844.000.000, maka realisasi tahun saat ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.000.000 atau 0,1%.

3. Komponen Akun Laporan Operasional

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan operasional menggambarkan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas selama satu tahun yang terdiri dari pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Pendapatan LO menunjukkan semua penerimaan riil sebagai penambah nilai ekuitas pemerintah daerah dalam periode tertentu, berdasarkan basis akrual, bukan berdasarkan kas seperti dalam LRA. Beban menunjukkan pengorbanan riil sebagai pengurang nilai ekuitas dalam satu periode pelaporan. Sedangkan, surplus/defisit menunjukkan perbedaan nilai antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Pada bagian ini, aparatur merincikan nilai pendapatan LO dan beban dari masing-masing akun seperti laporan realisasi anggaran. Kemudian membuat nilai presentase dan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

4. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun (2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menggambarkan penyajian informasi mengenai perubahan ekuitas selama periode tertentu, termasuk ekuitas awal, surplus/defisit dari laporan operasional, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berbasis SIPD RI pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain terselesaikannya CaLK, aparatur yang mendapatkan pelatihan secara aplikatif dan pendampingan langsung dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ketentuan SIPD RI. Hal ini terlihat dari cakupannya aparatur dalam menyerap setiap pengetahuan dan arahan yang diberikan oleh pendamping. Dimana aparatur mampu memahami struktur dan komponen penyusunan CaLK, menggunakan data dari SIPD RI secara efektif, serta menyusun laporan yang informatif dan sesuai regulasi. Pendampingan ini terbukti menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan kualitas laporan keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 14–28.
- Aulia, Y., Hasibuan, D. S. B., Waruwu, H., Gulo, P. D., & Nurhaliza, S. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Student Research*, 2(2), 79–86. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i2.2809>
- Dewi, N. K. N. P., Sasanti, E. E., & Kartikasari, N. (2023). Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Pemahaman Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualias Laporan Keuangan. *The 6th Febenefecium Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 191–202.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Gitarisdiana, C., Rasaili, W., & Andiriyanto, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 254–267.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.1 Revisi 2009)*.
- Kapantow, E. S., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 11(02), 494–505.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.
- Meynaldi, R., & Rosalina, R. R. (2023). Analisis Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan terhadap Media Pelaporan Keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 1524–1536. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.3826>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)*.
- Peraturan Pemenrintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.



- Prasetyo, R. D., & Utami, L. A. (2022). Sistem Informasi Catatan Atas Laporan Keuangan Pada Biro Perencanaan Dan Keuangan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Berbasis Web. *IJIS - Indonesian Journal On Information System*, 7(2), 90. <https://doi.org/10.36549/ijis.v7i2.197>
- Salain, P. P. P., & Wedana, I. komang jovan. (2023). Penerapan Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Dalam Pelaksanaan Laporan Keuangan Di UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Volume*, 2(1), 453–458.
- Sijabat, J., Siringoringo, M. J. B., & Simanjuntak, G. F. R. (2024). Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Pengelolaan Keuangan pada Kantor DPRD Kota. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 1169–1183.
- Syahrida. (2019). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24.

